

**ANALISIS *BEST PRACTICE* PENGEMBANGAN DESA WISATA LEREP
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

Vita Afrilisa, Maesaroh

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405**

Laman: www.fisip.undip.ac.id

Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Village development is a strategic component in realizing community welfare and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in poverty alleviation and local economic development. One way to achieve this is through the development of tourism villages. Lerep Tourism Village, West Ungaran District, Semarang Regency, is a tourism village that has successfully been classified as an advanced tourism village and has received various awards at the regional and national levels. This study aims to analyze best practices in the development of Lerep Tourism Village and supporting factors for tourism development. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews, participatory observation, and documentation. The research analysis refers to the concept of best practices according to Prasajo which includes impact, partnership, sustainability, leadership, and transferability, as well as supporting factors for tourism according to Cooper, namely attractions, accessibility, amenities, and supporting services. The results of the study indicate that the development of Lerep Tourism Village has met the criteria of best practices through economic and social impacts, internal and external partnerships, continuous innovation, visionary leadership, and knowledge transfer activities to other regions. Supporting factors for tourism include the diversity of tourism products, ease of access, availability of supporting facilities, and professionally managed tourism services, although there are still problems in optimizing the role of Pokdarwis at the hamlet level. As a suggestion, it is necessary to strengthen Pokdarwis institutions at the hamlet level and prepare tourism village management documents as development guidelines and references for other tourism villages.

Keywords: Best Practice, Development, Tourism Village, Tourism.

ABSTRAK

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi lokal, salah satunya melalui pengembangan desa wisata. Desa Wisata Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, merupakan desa wisata yang berhasil masuk klasifikasi desa wisata maju dan meraih berbagai penghargaan di tingkat daerah hingga nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik terbaik (*best practice*) pengembangan Desa Wisata Lerep serta faktor pendukung pengembangan kepariwisataan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada konsep *best practice* menurut Prasajo yang meliputi dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas, serta faktor pendukung pariwisata menurut Cooper yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Lerep telah memenuhi kriteria *best practice* melalui dampak ekonomi dan sosial, kemitraan internal dan eksternal, inovasi berkelanjutan, kepemimpinan visioner, serta kegiatan transfer pengetahuan kepada daerah lain. Faktor pendukung kepariwisataan meliputi keragaman produk wisata, kemudahan akses, ketersediaan fasilitas pendukung, dan pelayanan wisata yang dikelola secara profesional, meskipun masih terdapat permasalahan pada optimalisasi peran Pokdarwis di tingkat dusun. Sebagai saran diperlukan adanya penguatan kelembagaan Pokdarwis di tingkat dusun serta penyusunan dokumen pengelolaan desa wisata sebagai pedoman pengembangan dan referensi bagi desa wisata lain.

Kata Kunci: *Best Practice*, Pengembangan, Desa wisata, Kepariwisata

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pembangunan desa di Indonesia masih belum optimal dibandingkan wilayah perkotaan. Data Badan Pusat Statistik (Maret 2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perdesaan (12,22%) lebih tinggi dibandingkan perkotaan (7,29%), yang menandakan masih adanya kesenjangan pembangunan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa menjadi kunci dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diposisikan sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan mengelola potensi lokal serta didukung dana desa untuk mendorong pemberdayaan dan kemandirian.

Namun Berdasarkan Indeks Membangun Desa (IDM) tahun 2023, sebagian besar desa di Indonesia masih berstatus berkembang dengan jumlah mencapai 28.749 desa. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah desa berstatus Mandiri hanya sebanyak 4.348 Desa, sehingga diperlukan optimalisasi potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk

mendorong peningkatan kemandirian desa. Salah satu strategi pengembangan potensi desa adalah melalui sektor pariwisata berbasis lokal. Program desa wisata memungkinkan desa mengelola kekayaan alam dan budaya sebagai sumber pendapatan serta pemberdayaan masyarakat.

Secara regulatif, pengembangan desa wisata didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Hingga tahun 2023, jumlah desa wisata di Indonesia mencapai 4.674 desa, jumlah ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 3.419 desa wisata. Berdasarkan data Jejaring Desa Wisata Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah memiliki 511 desa wisata. Kabupaten Semarang sebagai salah satu Wilayah di Provisini Jawa Tengah memiliki persebaran desa wisata sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Semarang tahun 2024

No.	Nama Desa Wisata	Klasifikasi Desa	No.	Nama Desa Wisata	Klasifikasi Desa
1.	Agropark & RC	Rintisan	14.	Kelen Lepen Asri 07	Rintisan
2.	Branjang	Rintisan	15.	Kenteng	Rintisan
3.	Curug Sewu	Rintisan	16.	Kreatif Perdamaian Srumbung Gunung	Rintisan
4.	Curung Grenjeng	Rintisan	17.	Lembah Kendalisodo	Berkembang
5.	Curug Kembar Baladewa	Rintisan	18.	Lerep	Maju
6.	Desa Wisata Kedunggondang	Rintisan	19.	Menari Tanon	Rintisan
7.	Desa Wisata Tegalwaton	Rintisan	20.	Ngidam Mancur	Rintisan
8.	Gedangan	Rintisan	21.	Nyatnyono	Rintisan
9.	Gemawang	Rintisan	22.	Sambirejo	Rintisan
10.	Gili Pesona	Rintisan	23.	Samirono	Rintisan
11.	Kalongan	Rintisan	24.	Sitarung Desa Kemambang	Rintisan
12.	Kampung Jajar	Rintisan	25.	Wisata Alam Desa Wirogomo	Rintisan
13.	Kampung Susu Sumogawe	Maju	26.	Rowoboni	Rintisan

(Sumber: Jadesta.kememparekraf.2024)

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 23 dari 26 desa wisata di Kabupaten Semarang masih dalam klasifikasi desa rintisan, 1 desa berkembang, dan 2 desa wisata maju , yaitu Desa Kampung Susu Sumogawe dan Desa Lerep.

Kedua desa wisata tersebut dikategorikan sebagai desa wisata maju karena masyarakat telah sadar dan mampu mengelola potensi desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kampung Susu Sumogawe mengembangkan wisata berbasis peternakan dan olahan susu rumahan, Sementara Desa Wisata Lerep mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sosial, dan budaya secara terpadu sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Tabel 2. Jumlah Wisatawan Desa Wisata Lerep

No.	Tahun	Jumlah Wisatawan
1.	2022	2.768 wisatawan
2.	2023	6.211 wisatawan
3.	2024	9.570 wisatawan

(Sumber: website desa wisata lerep 2024)

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berdampak positif terhadap perkembangan Desa Wisata Lerep sejak ditetapkan pada 2015. Statusnya pun meningkat dari desa wisata rintisan (2016–

2018), berkembang (2018–2019), hingga menjadi desa wisata maju (2019–sekarang). Peningkatan kunjungan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui usaha penginapan, kuliner, pemandu wisata, serta pengembangan objek wisata baru. Namun, pengelolaan desa wisata masih menghadapi kendala partisipasi Pokdarwis. Terdapat tiga Pokdarwis, yaitu Rukun Santoso, Soka Ceria, dan Indrokilo Mulyo, tetapi hanya Rukun Santoso yang berperan optimal melalui inovasi paket wisata, pendataan kunjungan sejak 2022, serta penerapan prinsip Sapta Pesona. Sementara itu, Soka Ceria mengalami Keberhasilan Desa Wisata Lerep juga menarik perhatian daerah lain untuk melakukan studi banding, seperti Kecamatan Limbangan (Kabupaten Kendal) dan Kelurahan Bleberan (Kabupaten Gunungkidul). Keduanya mempelajari pengelolaan Desa Lerep sebagai desa wisata mandiri yang berkembang tidak hanya dari dana desa atau bantuan pemerintah, tetapi juga dari swadaya masyarakat dan dukungan program CSR melalui partisipasi dalam berbagai lomba desa wisata. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana *Best Practice* Kepariwisata di Desa Wisata Lerep? Serta apa saja faktor pendukung *Best Practice* pengembangan Desa wisata Lerep Kabupaten Semarang?

KAJIAN TEORI

Manajemen Publik

Manajemen publik bagi Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008: 93) merupakan usaha yang ditempuh individu maupun sekelompok orang ketika melaksanakan sebuah organisasi serta pendayagunaan sumber daya manusia perihal pencapaian tujuan organisasi. Manajemen publik merupakan bentuk pengelolaan sektor publik oleh institusi publik secara profesional melalui pendayagunaan berbagai potensi dan sumber daya organisasi, untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Penerapan manajemen publik dalam konteks penelitian ini adalah terkait dengan pengelolaan dan keberhasilan pengembangan desa wisata Lerep yang merupakan bentuk pelayanan publik oleh pemerintah desa, bersama masyarakat untuk untuk mendorong terciptanya keberhasilan desa wisata Lerep.

Best Practice (Praktek Terbaik)

Best practice menurut UN Habitat (dalam Eko, Prasajo. *et.all* 2004) didefinisikan sebagai inisiatif yang sukses memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang baik. hal ini dapat dilihat melalui; adanya dampak yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, kesuksesan *best practice* juga harus membangun kerjasama yang efektif

antar berbagai sektor, baik dari unsur publik, swasta, dan masyarakat pada akhirnya dapat berlangsung secara berkelanjutan yang memberikan manfaat pada dimensi sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan hidup. Perspektif Best Practice dapat membantu dalam mengidentifikasi praktik pengelolaan desa wisata Lerep yang bersifat umum dan praktik khusus dalam mendukung keberhasilan desa wisata lerep. Kriteria penilaian Best Practice menurut Eko, Prasajo. *et.all*. (2004) terdiri dari:

1. Dampak (*impact*)

Program harus memberikan dampak yang menghasilkan perubahan positif yang dapat diukur dan diamati secara langsung (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi sosial-ekonomi. Dampak yang diberikan harus bersifat inklusif yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok tertentu, namun harus lebih luas menjangkau masyarakat lainnya yang membutuhkan.

2. Kemitraan (*partnership*)

Implementasi *best practice* yang efektif tidak hanya dijalankan secara mandiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak yang mendukung proses pengelolaan dan pencapaian tujuan, setidaknya harus melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam mendapatkan hasil yang optimal.

3. Keberlanjutan (*sustainability*)

Menunjukkan, bahwa dampak positif dari best practice dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Keberlanjutan yang dimaksud tidak hanya terkait dengan aspek keuangan dan teknis, namun juga perubahan secara sistemik dan struktural

4. Kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan memiliki peranan penting dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan, kepemimpinan yang inspiratif mendorong terciptanya kebijakan publik yang mendorong terciptanya keterbukaan terhadap perkembangan dan perubahan sosial budaya.

5. Dapat ditransfer (*transferability*)

Inovasi yang dihasilkan ini nantinya harus memberikan manfaat ke organisasi atau daerah lainnya. Melalui penerapan inovasi atau program yang dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan serupa yang terjadi di daerah atau organisasi lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan, seminar, media sosial, kerjasama antar lembaga atau daerah, buku panduan, maupun kegiatan lainnya

Desa Wisata

Desa wisata menurut Nuryanti (dalam Nyta, Rosidha.dkk 2021) merupakan bentuk kolaborasi antara objek wisata, akomodasi, serta berbagai sarana penunjang lain yang ditampilkan melalui struktur kehidupan sosial

masyarakat yang berdampingan dengan tradisi yang berlaku di suatu wilayah desa. Terbentuknya desa wisata juga harus melibatkan kontribusi masyarakat, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap potensi pariwisata yang ada di lingkungannya. Sebagai sebuah destinasi wisata desa wisata harus memenuhi empat komponen utama dalam pengembangan pariwisata. Menurut Cooper. dkk (dalam Henita, Safitri & Dadan, K. 2021) unsur pengembangan potensi kepariwisataan terdiri dari:

1. *Attraction* (Atraksi) merupakan suatu produk wisata yang dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung
2. *Accessibilities* (Akses), merupakan sarana dan infrastruktur, untuk mendukung wisatawan berkunjung ke desa wisata, seperti kondisi jalan yang baik, adanya rambu lalu lintas, dan transportasi
3. *Amenities*, (Fasilitas Pendukung) berkaitan dengan adanya sarana dan prasarana, seperti penginapan, warung makan, layanan transportasi, agen perjalanan, sarana pendidikan, dan lain-lain.
4. *Ancillary Services* (layanan pendukung), berkaitan dengan adanya organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab mengelola

kegiatan desa wisata sehingga dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis *Best Practice* Pengembangan Desa Wisata Lerep. Situs Penelitian dilakukan di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari Kepala Desa Lerep, Ketua Pokdarwis Rukun Santoso, Direktur BUMDes Gerbang Lentera, Masyarakat Desa Lerep, dan Wisatawan Desa Lerep.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara, serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet, dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan analisis kualitas data diuji melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Best Practice* Pengembangan Desa Wisata Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang**

Best practice menjadi relevan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana program desa wisata telah dikelola sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat atau sasaran program. menurut UN Habitat (dalam Eko, Prasajo. *et.all* 2004) kriteria penilaian *best practice* terdiri dari, yaitu Dampak, kemitraan keberlanjutan, kepemimpinan, dan dapat ditransfer.

a. Dampak (*impact*)

Dampak yang positif merupakan dampak yang berhasil meningkatkan taraf hidup atau kondisi masyarakat yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, namun juga dirasakan secara luas oleh masyarakat lainnya yang membutuhkan. Mengacu pada konsep Muljadi (2009), pengembangan pariwisata seharusnya menciptakan lapangan kerja, memperluas usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program Desa Wisata Lerep terbukti memberikan dampak ekonomi nyata melalui munculnya sumber pendapatan baru dan diversifikasi mata pencaharian warga.

Sebelum adanya desa wisata, mayoritas masyarakat bergantung pada sektor pertanian. Setelah program berjalan, warga diberdayakan menjadi pemandu wisata berbasis aktivitas pertanian, dengan penghasilan sekitar Rp200.000–Rp400.000

per kunjungan. Selain itu, muncul pekerjaan baru seperti penyedia homestay, pengelola parkir, fotografer desa, pelatih tari, serta pelaku UMKM lokal.



Gambar 1. Jenis Pekerjaan Baru Desa Wisata Lerep

Sumber: Dokumentasi Desa Lerep.2025

Peningkatan kunjungan wisatawan juga mendorong perputaran ekonomi lokal, terlihat dari meningkatnya penjualan warung dan produk UMKM, seperti peyek khas desa. Dampak ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperluas jaringan ekonomi masyarakat hingga ke luar desa melalui sektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, program Desa Wisata Lerep berhasil menjadi praktik pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat desa.

Pengembangan Desa Wisata Lerep memberikan dampak sosial dan budaya yang signifikan melalui peningkatan partisipasi, perubahan nilai, serta penguatan modal sosial masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya berorientasi pada aktivitas pertanian tradisional kini memiliki kesadaran kolektif untuk mengelola pariwisata secara gotong royong dan

swadaya. Keterlibatan aktif Pokdarwis, BUMDes, karang taruna, hingga kelompok wanita tani menunjukkan tumbuhnya partisipasi dan rasa memiliki terhadap program desa wisata. Dari sisi budaya, desa wisata mendorong revitalisasi tradisi lokal seperti tari Caping Gangsing yang semakin dilestarikan dan diapresiasi wisatawan.



Gambar 2. Partisipasi warga dalam pelestarian budaya Desa Lerep

Sumber: Dokumentasi Pokdarwis Desa Lerep. 2025

Selain itu, terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan public speaking, pelayanan wisata, pengelolaan homestay, pengolahan produk lokal, hingga pemanfaatan media sosial. Dampak sosial ini turut berkontribusi pada pencapaian status Desa Lerep sebagai desa mandiri dengan nilai lebih dari 0, 8155 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Secara keseluruhan, pengembangan desa wisata Lerep mencerminkan praktik terbaik (best practice) karena tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga pada proses pemberdayaan sosial dan pelestarian budaya yang berkelanjutan.

b. Kemitraan (*Partnership*)

United Nations World Tourism Organization atau UNWTO (2018) menegaskan bahwa desa wisata yang berhasil umumnya ditopang oleh kemitraan yang kuat antara pemerintah lokal, lembaga ekonomi desa, komunitas, dan mitra eksternal. Kemitraan internal dalam pengembangan Desa Wisata Lerep menunjukkan pola tata kelola kolaboratif yang kuat dan terstruktur, di mana setiap aktor lokal memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas serta saling melengkapi satu sama lain. Pemerintah desa sebagai penggerak kebijakan dan fasilitator utama, BUMDes Gerbang Lentera berfungsi sebagai pengelola unit usaha desa yang mengoordinasikan berbagai kegiatan ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata. Namun demikian, pengelolaan operasional wisata diserahkan sepenuhnya kepada Pokdarwis.

Pengelolaan Desa Lerep sebagai desa wisata yang dikelola kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang menjadi aktor utama dalam pengelolaan operasional Desa Wisata Lerep, sedangkan dua Pokdarwis lainnya yaitu Pokdarwis Soka Ceria, dan Pokdarwis Indrokilo Mulyo mengalami fase tidak aktif dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh dua

Pokdarwis tersebut. Selain itu kemitraan internal Desa Wisata Lerep juga bersifat inklusif melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat, seperti Kelompok Wanita Tani, PKK, dan Karang Taruna.

Kemitraan eksternal dalam pengembangan Desa Wisata Lerep Hubungan kolaboratif terbangun dengan berbagai perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tabel 3. Data CSR Ke Desa Wisata Lerep

<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Tahun Pemberian
PT Pertamina	2018
PLN Peduli	2023
Bank Rakyat Indonesia	2024
Luvtrip By PT Sinergo Multi Lestarindo Tbk	2024

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti. 2026

Dukungan dari berbagai CSR tersebut tidak hanya berupa pendampingan atau pelatihan, tetapi juga dalam bentuk bantuan pendanaan langsung. Dana CSR digunakan untuk penguatan daya tarik wisata dan fasilitas pendukung, bukan sekadar kegiatan jangka pendek. Kemampuan Desa Wisata Lerep mempertahankan kepercayaan mitra eksternal menunjukkan kualitas tata kelola kemitraan yang baik dan berkelanjutan.

c. Keberlanjutan (*Sustainibility*)

Menurut UN Habitat (dalam Eko, Prasajo. *et.all* 2004) Keberlanjutan suatu program merupakan hal yang penting dalam menilai praktek terbaik (*Best Practice*). Desa Lerep sebagai desa wisata memiliki orientasi jangka panjang, melalui penguatan fondasi legalitas, manajemen kelembagaan, inovasi yang adaptif, keberlanjutan lingkungan, serta mekanisme evaluasi partisipatif.

1. Legislasi Pengembangan Desa Wisata Lerep

Menurut Grindle (2004), keberadaan regulasi formal menjadi prasyarat penting dalam keberlanjutan kebijakan publik karena memberikan kepastian hukum, kejelasan peran aktor, serta kontinuitas program lintas kepemimpinan. Keberlanjutan Desa Wisata Lerep ditopang oleh dasar regulasi yang kuat dan berjenjang, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga desa.

Berpegang pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dan desa dalam mengelola potensi lokal, termasuk sektor pariwisata. Desa Lerep secara resmi ditetapkan sebagai desa wisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 556/0431/2015, sementara di tingkat desa pengelolaan pariwisata dilembagakan

melalui Peraturan Desa Lerep No. 3 Tahun 2017 yang menetapkan BUMDes Gerbang Lentera sebagai pengelola unit usaha pariwisata.

2. Inovasi Desa Wisata Lerep

Menurut Rogers (2003), inovasi yang berkelanjutan adalah inovasi yang mampu menjawab kebutuhan aktual masyarakat dan pengguna layanan. Desa Lerep melakukan inovasi strategis untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan layanan pariwisata. Implementasi CHSE secara mandiri ini memperkuat citra desa sebagai destinasi yang aman dan layak dikunjungi oleh wisatawan.

Desa wisata lerep juga menyediakan layanan paket wisata edukasi terpadu yang dapat dijadikan dalam satu tempat, Pengelola memfasilitasi wisatawan jika ingin menikmati wisata petik kopi ataupun pengolahan susu, sehingga nantinya wisata ini dapat diakses dalam satu tempat saja layanan wisata yang fleksibel dan memperhatikan kebutuhan wisatawan, tanpa merusak struktur sosial maupun lingkungan desa.

3. Evaluasi Program Desa Wisata Lerep

Keberlanjutan Desa Wisata Lerep juga didukung oleh mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan

partisipatif. Menurut Patton (2008), evaluasi partisipatif memungkinkan program berkembang secara dinamis karena keputusan perbaikan didasarkan pada pengalaman nyata pelaksana dan pengguna layanan. Untuk mendorong keberlanjutan Desa Lerep sebagai desa wisata, pengelola juga melakukan proses evaluasi secara parsial oleh masing-masing kelompok masyarakat pengelola wisata. Sedangkan secara keseluruhan proses evaluasi juga dilakukan secara tahunan melalui musyawarah desa yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada kepala desa.

Selain itu proses evaluasi juga langsung dilakukan melalui umpan balik dari pengunjung yang datang ke destinasi wisata yang ada di Desa Lerep, baik dari media sosial, google review ataupun keluhan langsung yang disampaikan oleh pengunjung. Melalui proses evaluasi yang dijalankan oleh pengelola wisata Desa Lerep yang dilakukan mulai dari kelompok masyarakat terkecil, hingga pengelola utama wisata desa seperti BUMDes dan Pokdarwis ini, nantinya dapat diketahui aspek yang mendorong keberlanjutan program desa wisata di Desa Lerep adalah sinergitas antar lembaga pengelola wisata Desa Lerep

d. Kepemimpinan (*leadership*)

Desa wisata tidak hanya menuntut kemampuan administratif pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat, membangun kolaborasi antar-lembaga, serta menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Menurut Rondinelli (1981) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan lokal sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan lokal mengelola sumber daya, membangun partisipasi masyarakat, dan menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. gaya kepemimpinan kepala Desa Lerep yang menjadi motor penggerak terbentuknya Desa Lerep sebagai desa wisata.

Kepala Desa Lerep memiliki gaya kepemimpinan yang visioner. Pemimpin visioner memandang berbagai persoalan sebagai tantangan dan melihat masa depan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Kepala Desa lerep mendorong terwujudnya program desa wisata, bermula pada pengelolaan permasalahan limbah kotoran sapi di dusun Indrokilo. Upaya tersebut tidak hanya menjadi penyelesaian masalah lingkungan, tetapi menjadi titik awal munculnya aktivitas kepariwisataan di Desa Lerep.

Dampak kepemimpinan yang Visioner oleh Bapak Sumariyadi ini pengelolaan

wisata khususnya Pokdarwis Rukun Santoso berkembang menjadi lebih mandiri dan profesional, yang secara langsung berpengaruh terhadap kunjungan wisata, meskipun dua Pokdarwis lainnya masih dalam tahap berkembang tetapi keberlanjutan aktivitas wisata tetap berjalan dengan baik, selain itu masyarakat terlibat langsung dalam berbagai kegiatan lomba dan festival, sehingga dapat menumbuhkan semangat dalam memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan desa Lerep sebagai desa wisata, melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai ajang festival dan lomba untuk mendorong semangat warga memajukan kepariwisataan Desa Lerep. Dampak kepemimpinan kepala desa Lerep membawa Desa Lerep menjadi desa wisata yang maju dan memberikan pencapaian penghargaan sebagai berikut:

Tabel 4. Penghargaan yang diperoleh Desa Wisata Lerep

No	Penghargaan Desa Wisata Lerep	Asal Penghargaan
1.	Juara Umum Festival Desa Wisata Jateng 2017	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
2.	Juara II Apresiasi Kelembagaan Pokdarwis Jawa Tengah 2018	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
3.	Juara I Festival Kuliner Ndeso 2019	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
4.	Juara I Lomba Festival Desa Wisata dan Jambore Pokdarwis Kabupaten Semarang 2019	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
5.	Juara Harapan II Festival Kesenian Tradisional Jateng Fair 2019	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
6.	Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan Tingkat Nasional Tahun 2020	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7.	Penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan Tahun 2021	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
8.	Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
9.	Juara III Nasional Desa Brilian Tahun 2023	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
10.	Juara I Lomba Wana Lestari Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah III
11.	Penghargaan sebagai kolaborator dalam kegiatan The 5th PSYCHE 2023	Universitas Diponegoro
12.	Juara I desa Peduli Daerah Aliran Sungai Lestari Jawa Tengah Tahun 2024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.	Juara umum desa wisata berdikari tahun 2024	Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang
14.	Juara III lomba desa wisata Nusantara Tahun 2024	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sumber: Diolah Peneliti. 2025

e. Dapat Ditransfer (*Transferability*)

Transferability menurut Eko, Prasajo. *et.all* (2004) pengembangan suatu program atau inisiatif dapat dilihat melalui, pelajaran apa yang dapat ditiru oleh organisasi atau daerah lain, penerapan program atau inisiatif yang sama ditempat lain, dan bagaimana potensi pengembangan dilakukan oleh pihak lain. Desa Lerep sudah mampu memberikan dampak positif bagi pihak lainnya, baik itu melalui studi banding, workshop berbasis pengalaman lokal, serta pengakuan desa lain yang menyatakan terinspirasi oleh praktik pengelolaanya.

Tabel 5. Data Kegiatan Studi Banding ke Desa Lerep

Nama Instansi	Jenis Kegiatan
Desa Mojogedang Kab. Karanganyar	Studi banding pengelolaan BUMDes
Kalurahan Bleberan Kab. Gunung Kidul	Studi banding peningkatan kapasitas pamong kalurahan dan perkembangan pengelolaan wisata
Desa Gondang Kec. Limbangan Kab.Kendal	Studi banding kemampuan pengembangan desa wisata
DISBUDPAR Kota Cirebon	Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata
Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kab. Nganjuk	Studi Tiru pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
Pokdarwis Lembur Camperenik Ciasem Baru Kab. Subang	Tata kelola Desa Wisa

Sumber: Diolah Peneliti. 2025

Adanya frekuensi kunjungan kegiatan *transferability* ini menandakan bahwa model pengelolaan Desa Lerep dianggap relevan dan adaptif, diterapkan pada konteks daerah lain, khususnya dalam pengelolaan desa wisata, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia, serta Ekonomi kreatif yang menjadi aspek pengetahuan yang ingin didapatkan daerah

atau desa lainnya yang berkunjung ke Desa Lerep dalam melakukan kegiatan *transferability*. Salah satu desa wisata yang mereplikasi pengelolaan Desa Wisata Lerep dalam pengelolaan desa wisata adalah Kampung Argotelo Salatiga. Desa Wisata Lerep telah memenuhi indikator *transferability* dalam pengembangan desa wisata.

Faktor Pendukung Pengembangan Kepariwisata Desa Wisata Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Menurut Cooper dkk. (dalam Henita, Safitri & Dadan, 2021), pengembangan potensi kepariwisataan mencakup empat unsur utama, yaitu atraksi (*attraction*), aksesibilitas (*accessibilities*), fasilitas pendukung (*amenities*), dan layanan pendukung (*ancillary services*).

a. Atraksi

Menurut Cooper et. al.,1998 atraksi merupakan komponen utama dalam pariwisata karena menjadi alasan utama wisatawan melakukan kunjungan. Atraksi meliputi wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan, yang harus mempunyai keunikan dan nilai jual khas suatu destinasi. Desa Lerep memiliki ragam atraksi antara lain, curug indrokilo, embung sebligo, wisata outbound “Pulang Ke Rumah Nenek” paket wisata Saras Loka

yang didalamnya terdapat berbagai pilihan kegiatan, seperti senam, terapi ikan, belajar tarian Caping Gangsing, tarian khas Desa Lerep, belajar gamelan dan menanam padi, serta wisata pasar jajanan tradisional yang digelar setiap minggu pon. Keragaman atraksi ini memperlihatkan kemampuan desa dalam mengembangkan produk wisata yang bervariasi sehingga mampu menjangkau berbagai segmen wisatawan.

Kombinasi antara wisata buatan dan kearifan lokal yang diberikan oleh Desa Wisata Lerep dapat memberikan pengalaman wisata yang berkesan bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Lerep. Pengelola wisata melibatkan langsung masyarakat dalam mendorong keberlanjutan wisata Desa Lerep, sehingga manfaat tidak hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu saja, masyarakat dilibatkan untuk memperkuat atraksi yang telah dikembangkan sebagai pengelola yang ramah dan informatif kepada wisatawan.

b. Aksesibilitas

Menurut Cooper et al. (1998), aksesibilitas mencakup kondisi jalan, ketersediaan rambu penunjuk arah, serta dukungan sarana transportasi yang memadai, karena akses yang baik akan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Dalam konteks tersebut, Desa Wisata Lerep memiliki tingkat keterjangkauan yang

cukup baik karena lokasinya relatif dekat dengan pusat Kabupaten Semarang. Meskipun secara geografis berada di kawasan perbukitan dengan kondisi jalan yang menanjak dan relatif sempit, pemerintah desa bersama pemerintah daerah telah mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan masuk serta gapura desa guna mempermudah akses menuju lokasi wisata.

Selain akses fisik, dukungan teknologi juga memperkuat kemudahan akses ke Desa Lerep. Lokasi desa telah terintegrasi dengan layanan navigasi digital seperti Google Maps dan peta online melalui website Kelurahan Desa Lerep. Pengelola juga menyediakan layanan penjemputan di pintu masuk desa, serta alternatif transportasi seperti angkutan lokal bagi wisatawan yang menggunakan kendaraan besar seperti bus yang tidak dapat masuk ke area desa, dengan koordinasi terlebih dahulu. Meskipun terdapat keterbatasan akses untuk kendaraan tertentu, optimalisasi infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi yang responsif dari pengelola mampu menjaga kenyamanan serta tetap menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Lerep.

c. Amenities (Fasilitas Pendukung)

Menurut Cooper et al. (1998), *amenities* atau fasilitas pendukung pariwisata meliputi penginapan, tempat makan,

fasilitas umum, dan sarana penunjang lainnya. Yoeti (2008) menegaskan bahwa fasilitas yang baik tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mendukung pengalaman wisata yang autentik. Dalam konteks tersebut, Desa Lerep telah menyediakan fasilitas yang relatif lengkap, seperti warung dan tempat makan milik warga, koperasi UMKM dengan produk kerajinan lokal, homestay berbasis rumah warga, serta fasilitas dasar berupa toilet, mushola, dan gazebo di area paket wisata. Sistem homestay yang diterapkan tidak sekadar menyediakan akomodasi, tetapi juga membuka ruang interaksi budaya langsung antara wisatawan dan masyarakat, sehingga memperkuat konsep *community-based tourism* yang menjadi karakter desa wisata Lerep.

Meskipun belum tersedia fasilitas seperti ATM dan restoran besar, keterbatasan ini tidak menjadi hambatan signifikan karena Desa Lerep mengusung konsep wisata pedesaan yang tidak berorientasi pada pariwisata massal. Kekurangan tersebut diantisipasi melalui alternatif seperti pembayaran non-tunai (QRIS) dan keberadaan agen bank BNI, BRI, serta bank lainnya. Selain itu, fasilitas umum yang ada dikelola dengan baik dan terawat, seperti kamar mandi yang bersih, kawasan wisata yang tertata, dan gazebo yang nyaman. Dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya dilengkapi fasilitas

modern, Desa Lerep mampu mengelola amenities secara efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan wisatawan.

d. *Ancillary services* (Layanan Pendukung)

Ancillary services berkaitan dengan tata kelola dan kualitas pelayanan, yang menurut Cooper et al. (1998) ditentukan oleh kompetensi organisasi pengelola. Desa Wisata Lerep memiliki kelembagaan yang kuat dan sinergis antara Pemerintah Desa, BUMDes Gerbang Lentera, Pokdarwis Rukun Santoso, dan Karang Taruna, dengan pembagian peran yang jelas sehingga pengelolaan berjalan profesional dan terstruktur. Respons cepat terhadap keluhan wisatawan menunjukkan pelayanan yang adaptif.

Kompetensi juga terlihat pada promosi melalui Instagram @desawisatalerep dan website desa yang dikelola karang taruna di bawah pengawasan pokdarwis, dengan informasi lengkap dan mudah diakses. Didukung layanan keamanan, penjemputan, jalur tracking, pemandu, dan rambu yang tertata, pengelolaan *ancillary services* di Desa Lerep mencerminkan praktik yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada kenyamanan wisatawan.

Peran Faktor Pendukung Kepariwisataan Dalam Mewujudkan *Best Practice* Pengembangan Desa Wisata Lerep

Pengembangan Desa Wisata Lerep menunjukkan bahwa faktor pendukung kepariwisataan yang meliputi *attraction*, *accessibility*, *amenities*, dan *ancillary services* memiliki peran strategis dalam mewujudkan lima aspek *best practice*, yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan *transferability*. Pada aspek dampak, faktor *attraction* dan *amenities* menjadi penggerak utama karena pengemasan wisata alam, edukasi pertanian, dan pelestarian budaya dalam bentuk paket wisata terstruktur telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, yang berdampak langsung pada pertumbuhan *homestay*, UMKM, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Fasilitas pendukung seperti *homestay* berbasis warga dan area parkir turut meningkatkan kenyamanan serta lama tinggal wisatawan sehingga memperkuat efek ekonomi lokal.

Dalam aspek kemitraan, *ancillary services* tercermin melalui kolaborasi yang jelas antara Pokdarwis, BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat di tingkat dusun, yang menunjukkan pembagian peran, koordinasi kelembagaan, serta tata kelola kolaboratif sebagai ciri praktik

terbaik. Pada aspek keberlanjutan, pengembangan *attraction*, *accessibility*, dan *amenities* dilakukan secara bertahap dan berbasis potensi lokal dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan nilai budaya, sehingga tidak bersifat eksploitatif. Dalam aspek kepemimpinan, keberhasilan desa wisata didukung oleh peran aktif kepala desa dan pengelola wisata dalam memperkuat kelembagaan, membangun kerja sama eksternal, serta mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif. Sementara itu, dalam aspek *transferability*, sistem pengelolaan yang tertata mulai dari pengemasan paket wisata, pembagian peran kelembagaan, hingga administrasi dan pendataan kunjungan menjadikan model Desa Wisata Lerep layak direplikasi oleh desa lain karena memiliki pola integrasi faktor pendukung yang sistematis dan adaptif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan Desa Wisata Lerep telah memenuhi lima aspek best practice, yaitu dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas. Dampaknya terlihat pada peningkatan ekonomi masyarakat, partisipasi sosial, dan pelestarian budaya. Kemitraan terjalin antara pemerintah desa, Pokdarwis,

BUMDes, masyarakat, dan mitra eksternal dengan pembagian peran yang jelas, meskipun partisipasi di tingkat dusun masih perlu ditingkatkan. Keberlanjutan didukung regulasi, kelembagaan yang kuat, dan regenerasi pengelola, sementara kepemimpinan kepala desa yang visioner menjadi faktor kunci keberhasilan. Praktik ini juga memiliki nilai pembelajaran bagi desa lain. Keberhasilan tersebut diperkuat oleh faktor pendukung pariwisata berupa atraksi lokal, aksesibilitas, *amenitas*, dan layanan pendukung yang memadai, sehingga menjadikan Desa Wisata Lerep sebagai model desa wisata maju dan berkelanjutan.

SARAN

1. Belum optimalnya peran Pokdarwis Indrokilo Mulyo dan Pokdarwis Soka Ceria menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan melalui pendampingan, pelatihan partisipatif, dan komunikasi inklusif agar keterlibatan masyarakat meningkat dan pengembangan desa wisata lebih merata.
2. Pengembangan Desa Wisata Lerep yang berdampak positif perlu didukung dokumentasi sistematis mengenai model pengelolaan, kemitraan, dan partisipasi masyarakat, agar menjadi bahan pembelajaran internal sekaligus referensi replikasi best practice secara berkelanjutan bagi desa lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25.
- Esariti, L., dkk. (2023). Optimalisasi pengembangan Desa Wisata Lerep.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548.
- Hanafi, M., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (2025). Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Lerep.
- Jadesta. (2023). *Sebaran desa wisata Indonesia*.
- Jadesta. (2024). *Pedoman desa wisata*.
- Jadesta Jateng. (2024). *Desa wisata Jawa Tengah*.
- Keban, T. Y. (2004). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Gavamedia.
- Kontan. (2024). Juara Desa BRILian 2023 Desa Lerep.
- Kurnianingtyas, & Pratama. (2023). Dampak pariwisata terhadap Salsabila, & Puspitasari. (2023). Peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata.
- Saragih. (2017). Peran BUMDes dalam pengelolaan ekonomi desa.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata*. Gava Media.
- Yanti, & Indahsari. (2024). Dampak desa wisata terhadap SDGs desa.
- Yoeti, O. A. (1993). *Pengantar ilmu pariwisata*. Angkasa.
- kondisi sosial ekonomi Desa Wisata Lerep.
- Lerepdesawisata.com. (2024). *Data dan penghargaan Desa Lerep*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*.
- Northouse, P. G. (2016). *Leadership: Theory and practice* (7th ed.). Sage Publications.
- Nuryanti, W. (1993). Concept, perspective and challenges.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). Sage Publications.
- Peraturan BPK RI. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Prasojo, E., Kurniawan, T., & Hasan, A. (2004). *Reformasi birokrasi dalam praktek*. Universitas Indonesia.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective.
- Zebua, dkk. (2024). Analisis gaya kepemimpinan visioner.